

Literasi Keuangan dan Investasi Syariah di Kalangan Gen Z

M Fatchurrohman, SHI. ME.
Dosen Ekonomi Islam Unwahas

Generasi dari Tahun ke Tahun



Boomers

1940 - 1959



Generasi X

1960 - 1979



Generasi Y
(Millennials)

1980 - 1994



Generasi Z

1995 - 2010



Generasi
Alpha

Setelah 2010





"GENERASI Z" INDONESIA ANGGAP AGAMA PALING PENTING

1	Indonesia	93%
2	Nigeria	86
3	Turki	71
4	Afrika Selatan	70
5	Brasil	70
6	Tiongkok	70
7	India	65
8	Amerika Serikat	54
9	Israel	53
10	Kanada	31

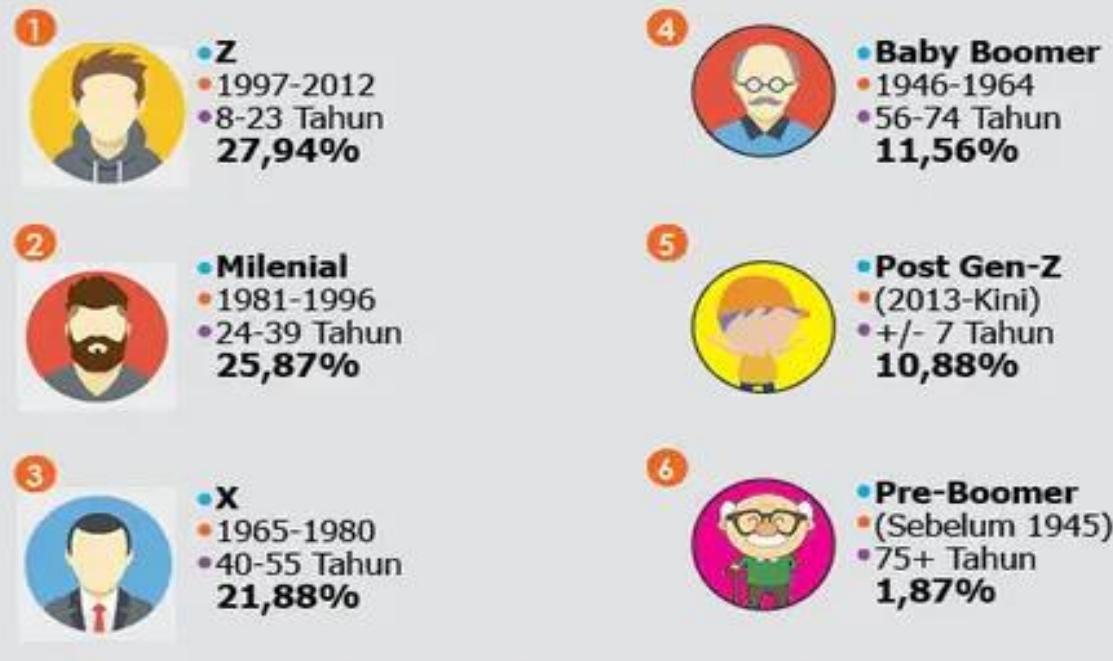
Komitmen terhadap agama menjadi salah satu faktor penting kebahagiaan Generasi Z (usia 18-21 tahun).



RATA-RATA DUNIA
44%

SUMBER: VARKEY FOUNDATION (GENERATION Z : GLOBAL CITIZEN SURVEY, 2017)
NASKAH: WIDYA NANDINI | DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI

GEN Z DOMINASI PENDUDUK INDONESIA



"Saat ini penduduk Indonesia didominasi Generasi Z, disusul Milenial. Generasi Baby Boomer semakin langka."

KECUK SUHARIYANTO
Kepala Badan Pusat Statistik/BPS

271.349.889
Jumlah Penduduk
Indonesia 2020

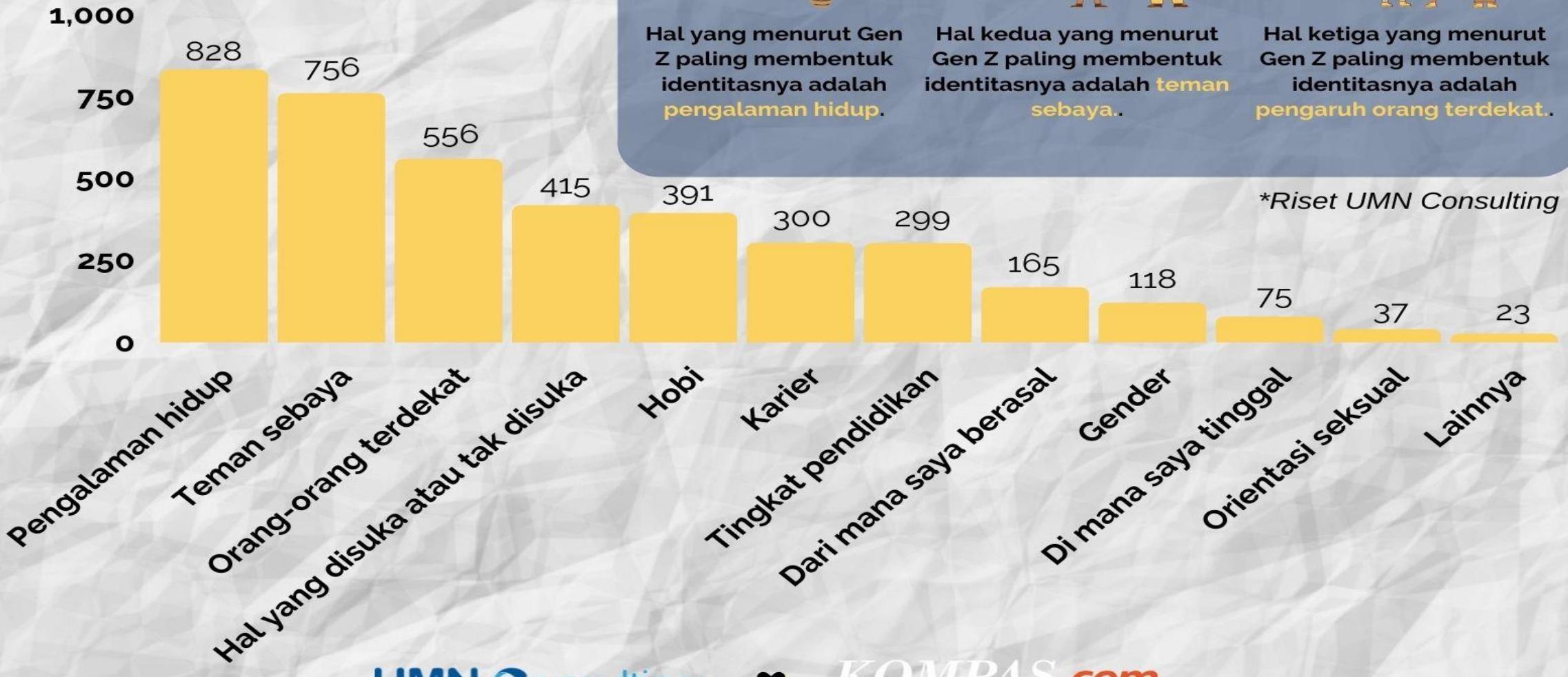
137.199.901
Perempuan

134.229.988
Laki-Laki

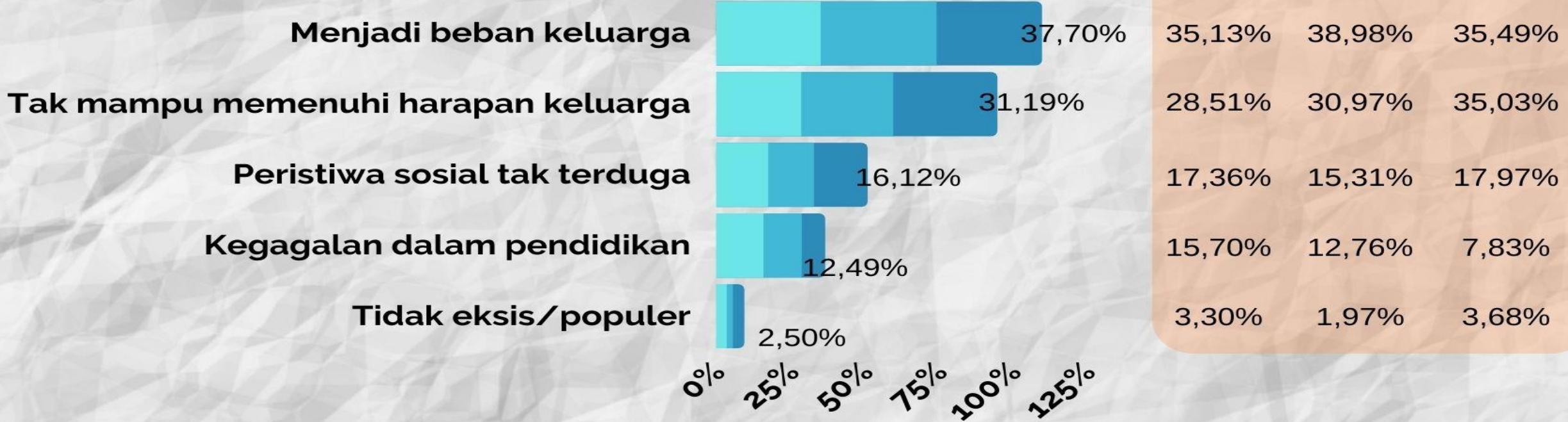
LIPUTAN 6
Bahan Data:
Update Februari 2021.
Sumber Data: BPS
Otak Data: Mitra NM Suryana
Grup: Trik Yati
Tanggal: 26 Januari 2021

86.437.053
Keluarga

HAL YANG MEMBENTUK IDENTITAS GEN Z



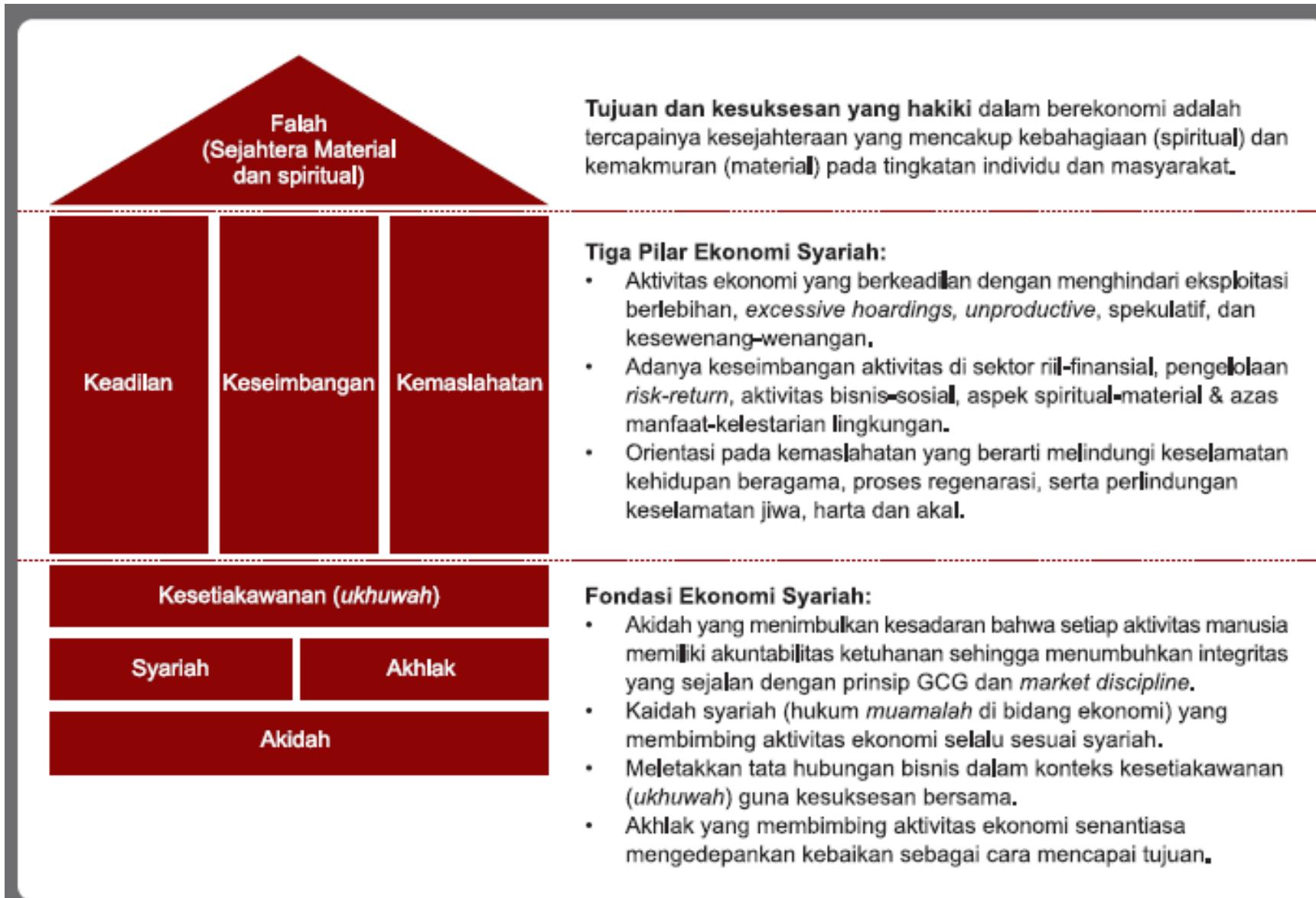
HAL YANG PALING DIKHAWATIRKAN GEN Z



12 KEPRIBADIAN GENERASI Z



Konsep Dasar Ekonomi Syariah



Prinsip Dasar Ekonomi Syariah



Referensi: Mannan (1970), Siddiqui (1981), Kahf (1973), Sheikh (1957), Hasanuzzaman (1976), Agil dan Ghazali (2005), Chapra (2008), Askari, Iqbal, Krichene, dan Mirakhor (2010) dll.

Outlook Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia diproyeksikan terus tumbuh positif di kisaran 4-5% hingga akhir tahun 2024.

Heatmap Indikator Ekonomi dan Keuangan Domestik

Indikator	2022				2023				2024	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Sep*	Q4*	Full Year*	Full Year*
PDB	5,01	5,44	5,72	5,32	5,03	5,17	4,94	5,01	5,04	4,85
Inflasi	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,41	2,55	2,67	2,45
BI Rate	3,50	3,50	4,25	4,50	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,50
Kurs USD/IDR	14.369	14.898	15.228	15.568	14.995	14.993	15.034-15.646	14.829-15.311	14.829-15.311	14.511-15.681
IHSG	7.071	6.912	7.041	6.665	6.805	6.682	645.607.181	6.862-7.200	6.862-7.200	7.118-7.444
PMI	51,30	50,20	53,70	50,90	51,90	52,50	53,60	53,38	53,38	53,40
Consumer Confidence	111,00	128,20	117,20	119,90	123,30	127,10	123,90	125,50	125,50	124,40
Retail Sales YoY%	9,30	4,10	4,60	0,04	4,80	7,90	5,52	4,06	4,06	6,77

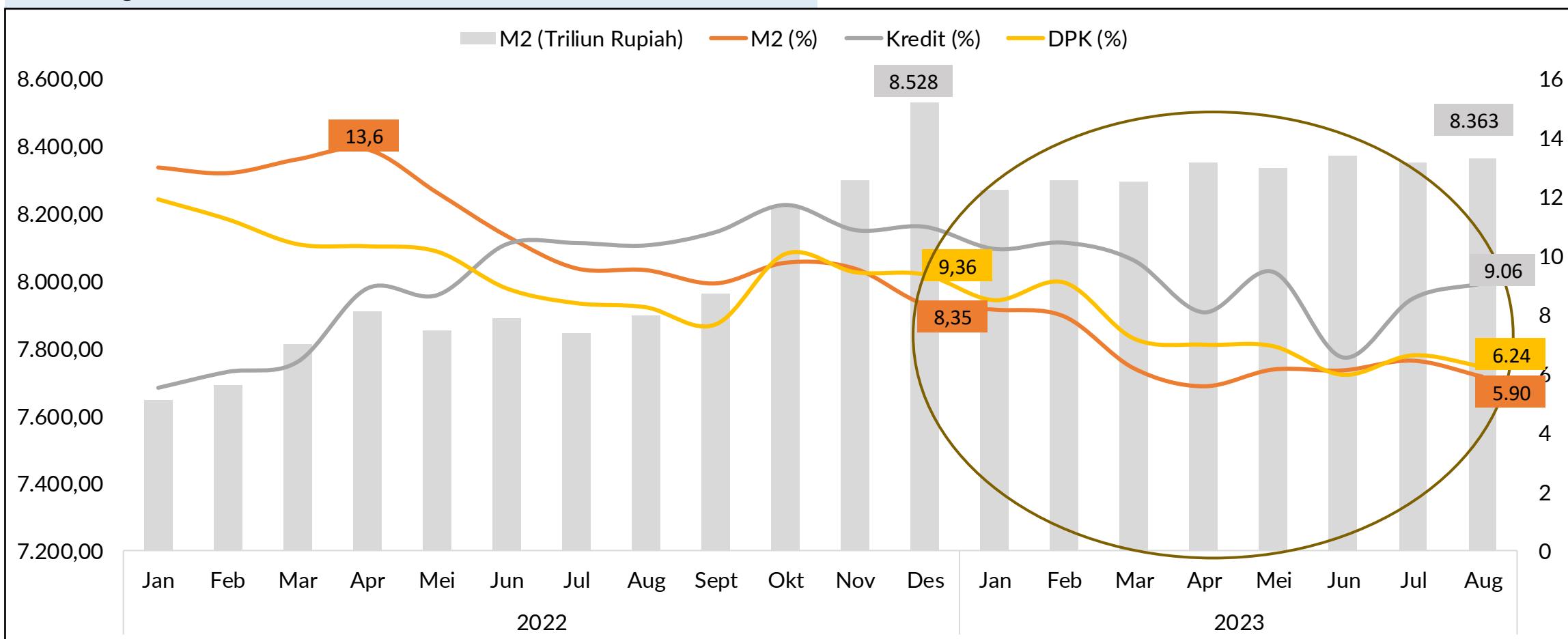
*) Proyeksi

Sumber: Bloomberg, BI, BPS, Analisis OCE (2023)

Perkembangan Makro Ekonomi dan Industri Perbankan Nasional

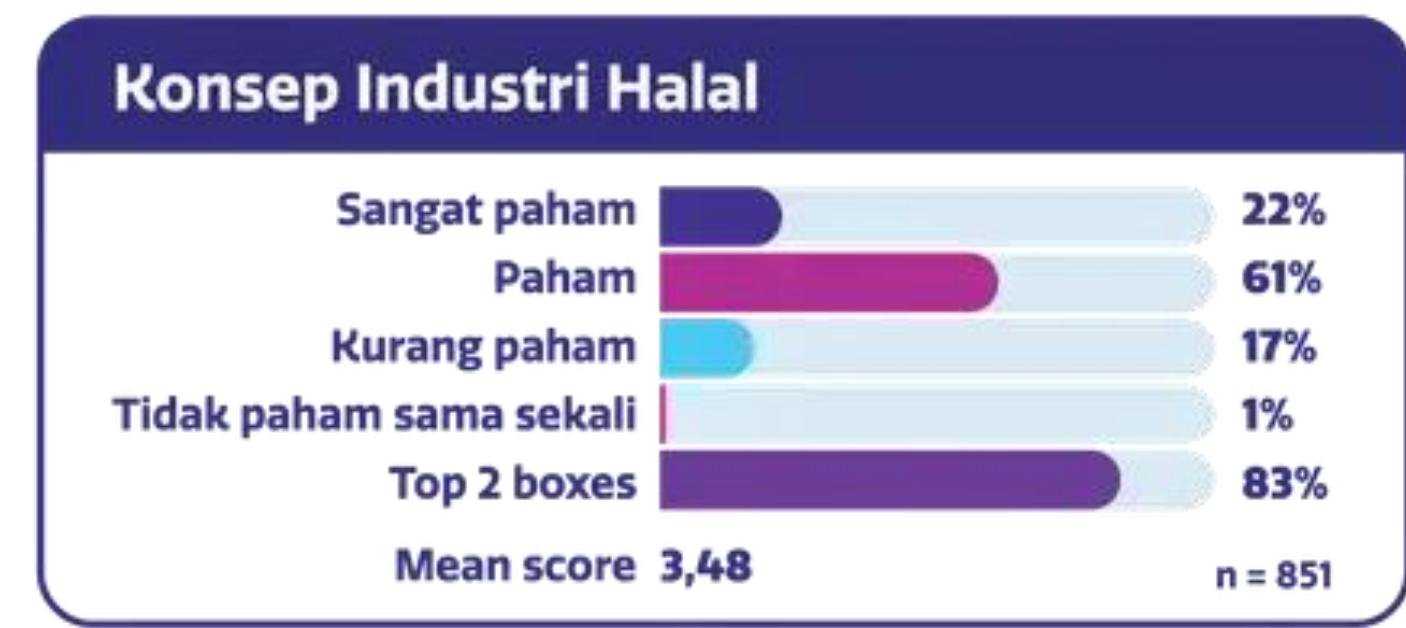
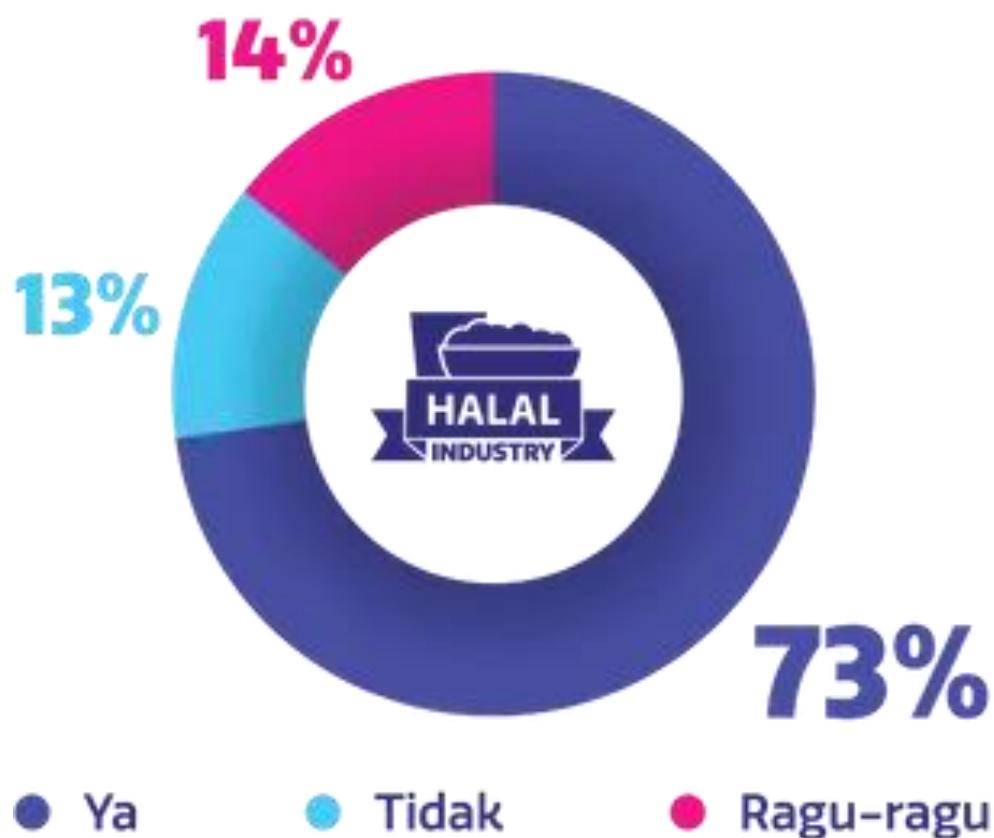
- Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2023 tumbuh melambat di 5,94% (YoY), lebih rendah dibanding Des 2022 (8,35%) dan April 2022 (13,6%).
- Pertumbuhan DPK industri perbankan nasional pada Agustus 2023 tercatat sebesar 6,24%, menurun dibanding Des 22 (9,36%)

Uang Beredar (M2) dan Pertumbuhan Kredit dan DPK (YoY)



Grafik 1.

PEMAHAMAN MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP INDUSTRI HALAL



n total = 1.165

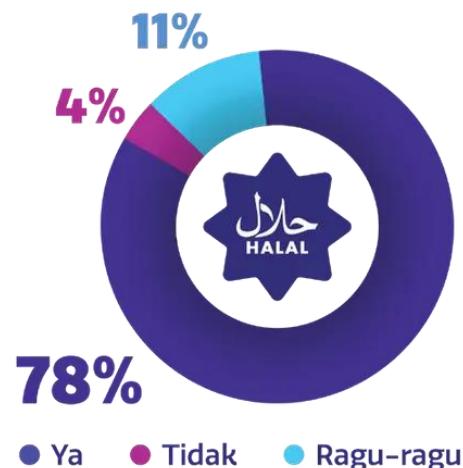
Sumber: Populix

KEUNGGULAN INDUSTRI HALAL INDONESIA

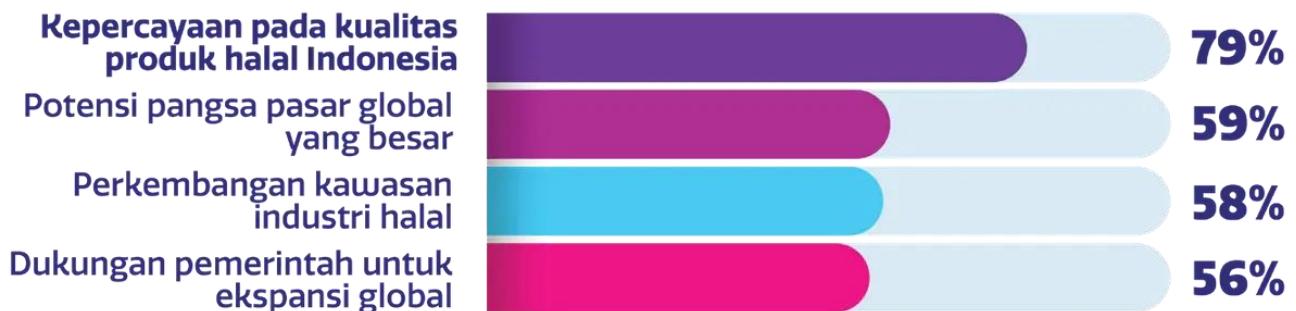


n = 992

Potensi Industri Halal



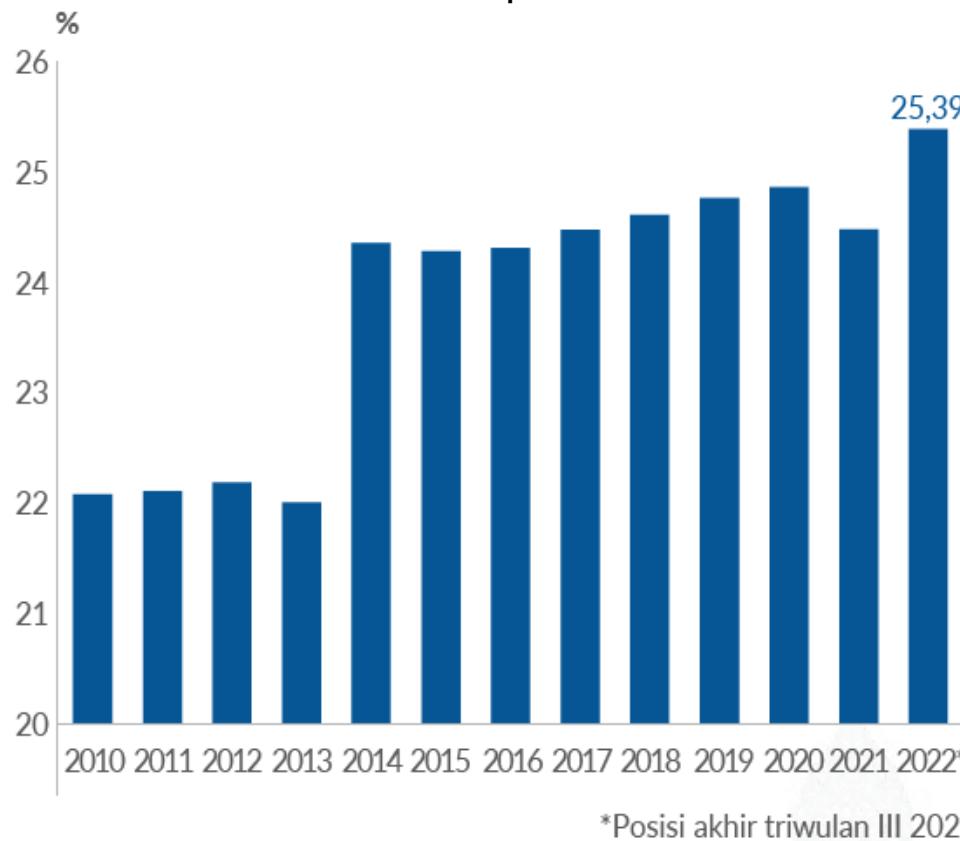
Faktor Pendorong Potensi Industri Halal di Pasar Global



Halal Value Chain dan Pembiayaan Perbankan Syariah

Ekonomi Syariah melalui *Halal Value Chain* (HVC) berkontribusi terhadap 25% dari PDB Nasional. Sementara pembiayaan perbankan syariah untuk sektor ekonomi yang terkait HVC tumbuh *double digit*.

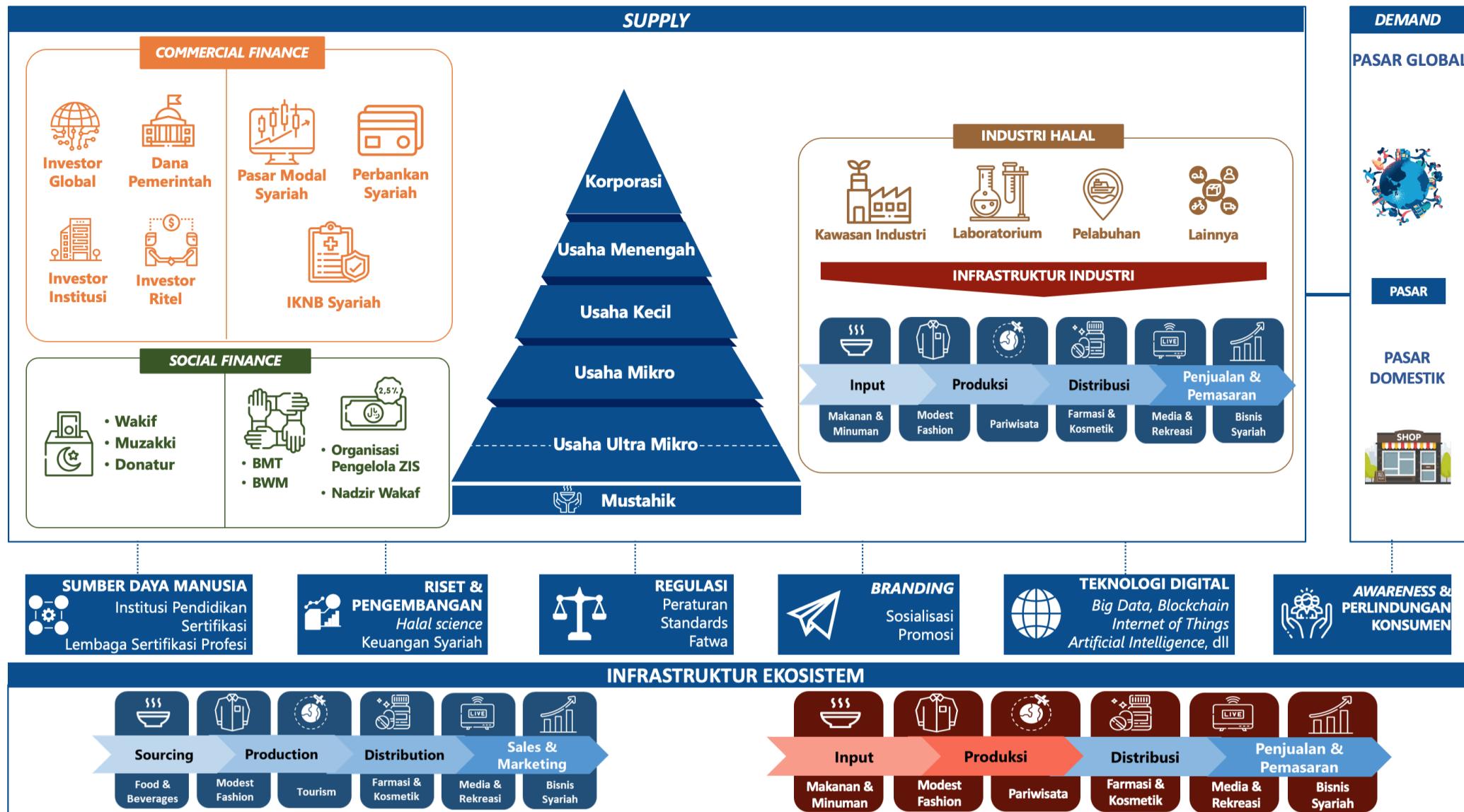
Grafik: Perkembangan Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap PDB



Sektor Ekonomi (Related HVC)	Perbankan Syariah		
	Juni 2023	Rp Miliar	Share
			Growth YoY
Industri Pengolahan	35.201	6,70%	18,32%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	25.692	4,89%	46,12%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5.558	1,06%	16,39%

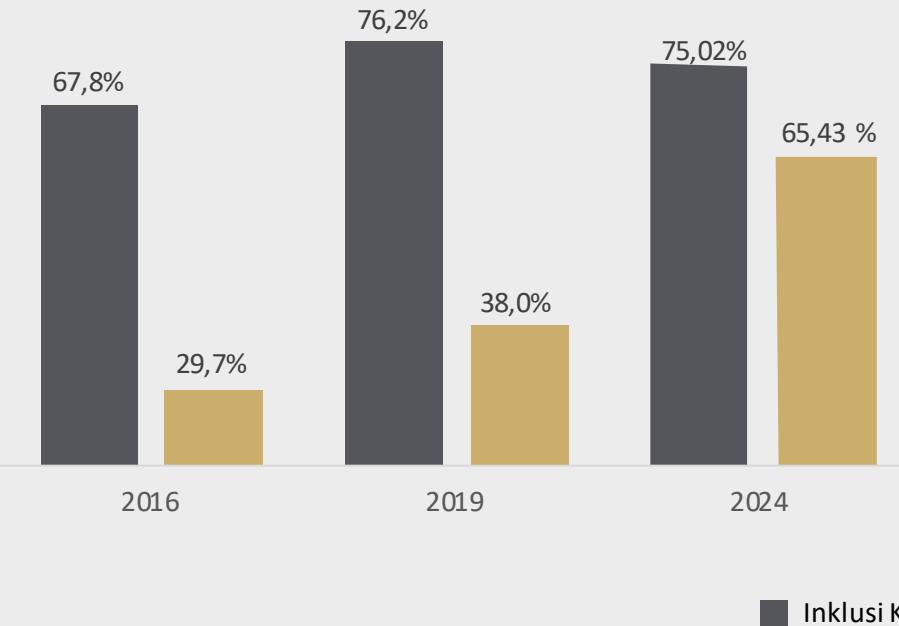
Ekosistem Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mencakup keuangan komersial dan sosial syariah, industri halal, komunitas, dunia usaha, hingga ekosistem pendukung ekonomi syariah.

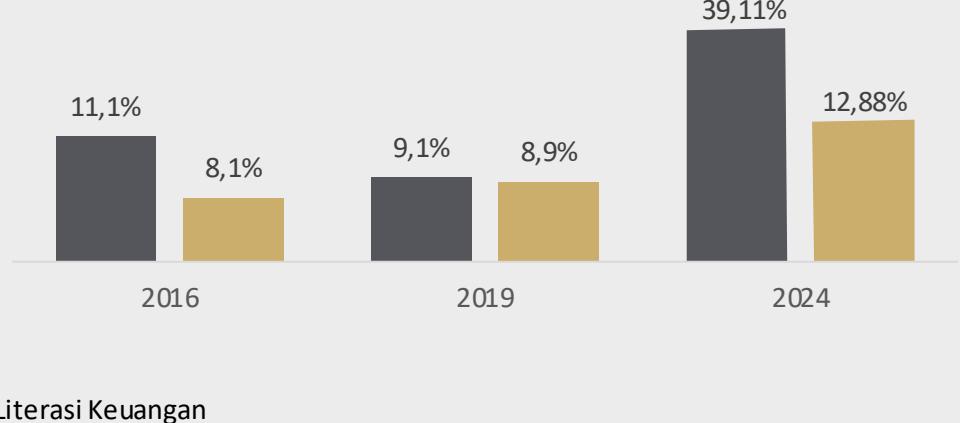


Kondisi saat ini: Inklusi dan literasi atas keuangan syariah masih rendah

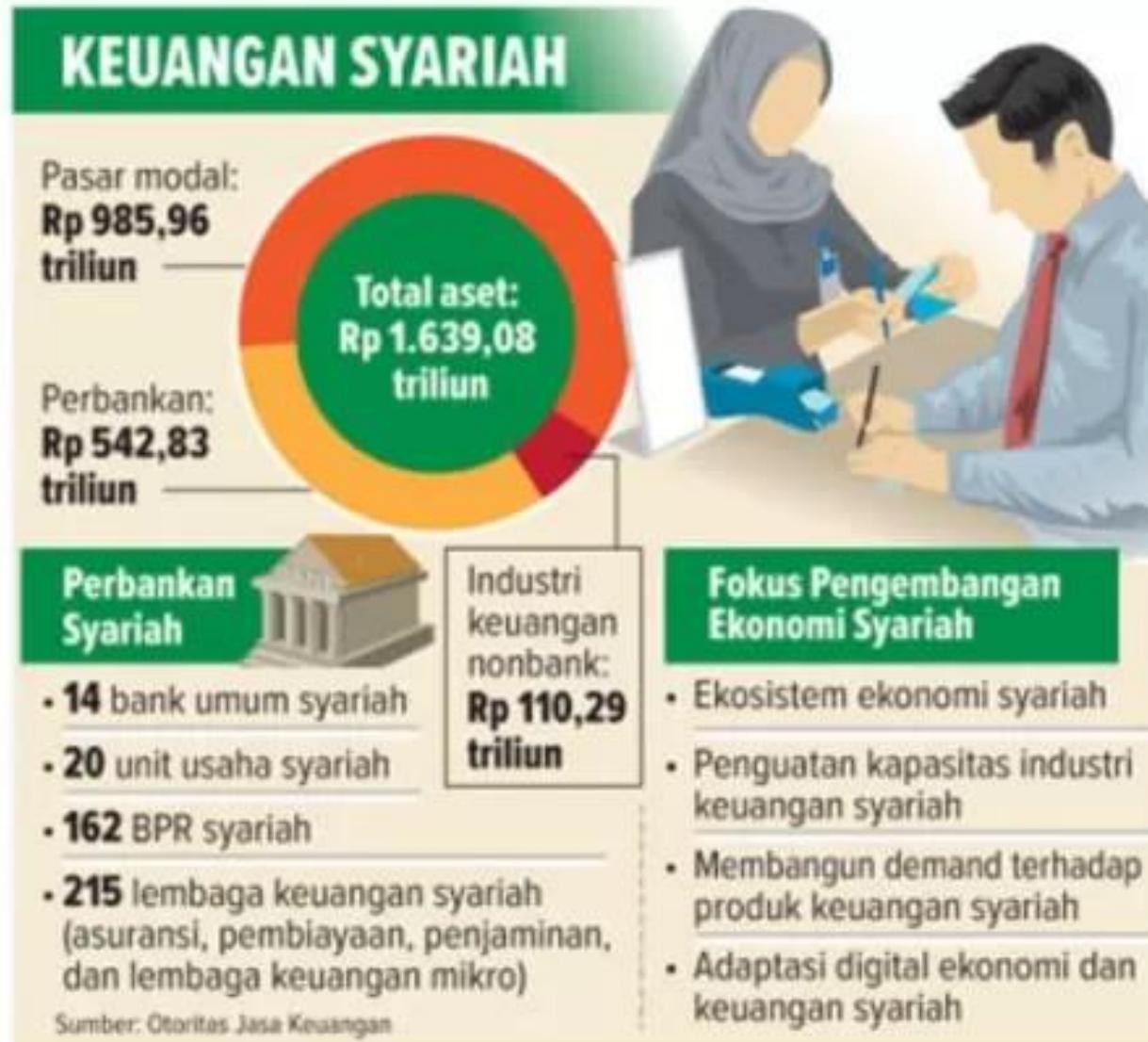
Keuangan Nasional



Keuangan Syariah Nasional



Kondisi Keuangan Syariah Nasional



Potensi Ekosistem Islam dan Halal di Indonesia

							
 Deskripsi	Tempat ibadah umat Muslim, serta Kebersamaan komunitas – dipimpin oleh sebuah asosiasi (mis. Dewan Masjid Indonesia)	Perjalanan religi (setahun sekali untuk Haji, sepanjang tahun untuk Umrah) – diselenggarakan oleh agen perjalanan berlisensi	Kegiatan amal dan/atau donasi – singkatan dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf	Sekolah negeri atau swasta, sekolah berasrama (pesantren), dan universitas yang menekankan pada kajian Islam	UMKM atau pasar dengan produksi, distribusi, serta pemasaran berdasarkan prinsip-prinsip Islam	Penjual dan penyedia makanan dan minuman dengan sertifikasi halal	Rumah sakit berbasis syariah dan teknologi layanan kesehatan yang Mengintegrasikan produk halal
 Contoh lembaga	 				 		
 Besar ekosistem	~240 Ribu masjid ~3.6 Juta Individu	~1956 Lembaga @150.000 jemaah tiap tahunnya	~13512 Lembaga ~7 Juta nasabah payroll	~98.000 sekolah ~27.000 pesantren ~400 universitas	~208 Lembaga Halal ~650.000 UMKM (1% dari 65 juta UMKM di Indonesia) ¹	~3.115 rumah sakit ~7.319 Klinik ~14 juta tenaga Kesehatan	
Potensi addressable market³ (2025)	Penetrasi Institusi: 50% DPK: IDR ~7.2Tn	Penetrasi Institusi: 95% DPK: IDR ~10.4Tn	Penetrasi Institusi: 30% DPK: IDR ~8.2Tn	Penetrasi Institusi: ² 50% DPK: IDR ~20Tn	Penetrasi Institusi: 50% DPK: IDR ~2.6Tn	Penetrasi Institusi: 30% DPK: IDR ~12Tn	
Realisasi Juli 2023	Penetrasi Institusi: 19,83% DPK : ~2.5T	Penetrasi Institusi: 90,74% DPK: ~2.7T ³	Penetrasi Institusi: 13,21% DPK: ~923 M	Penetrasi Institusi: 20,47% DPK : ~5,03T	Penetrasi Institusi: 29,32% DPK : ~149 M	Penetrasi Institusi: 15,4% DPK : ~1.15 T	

1. 1% dari seluruh UMKM di Indonesia memiliki sertifikasi halal

2. Exclude Universitas

3. Include dana tabungan haji

Ekosistem

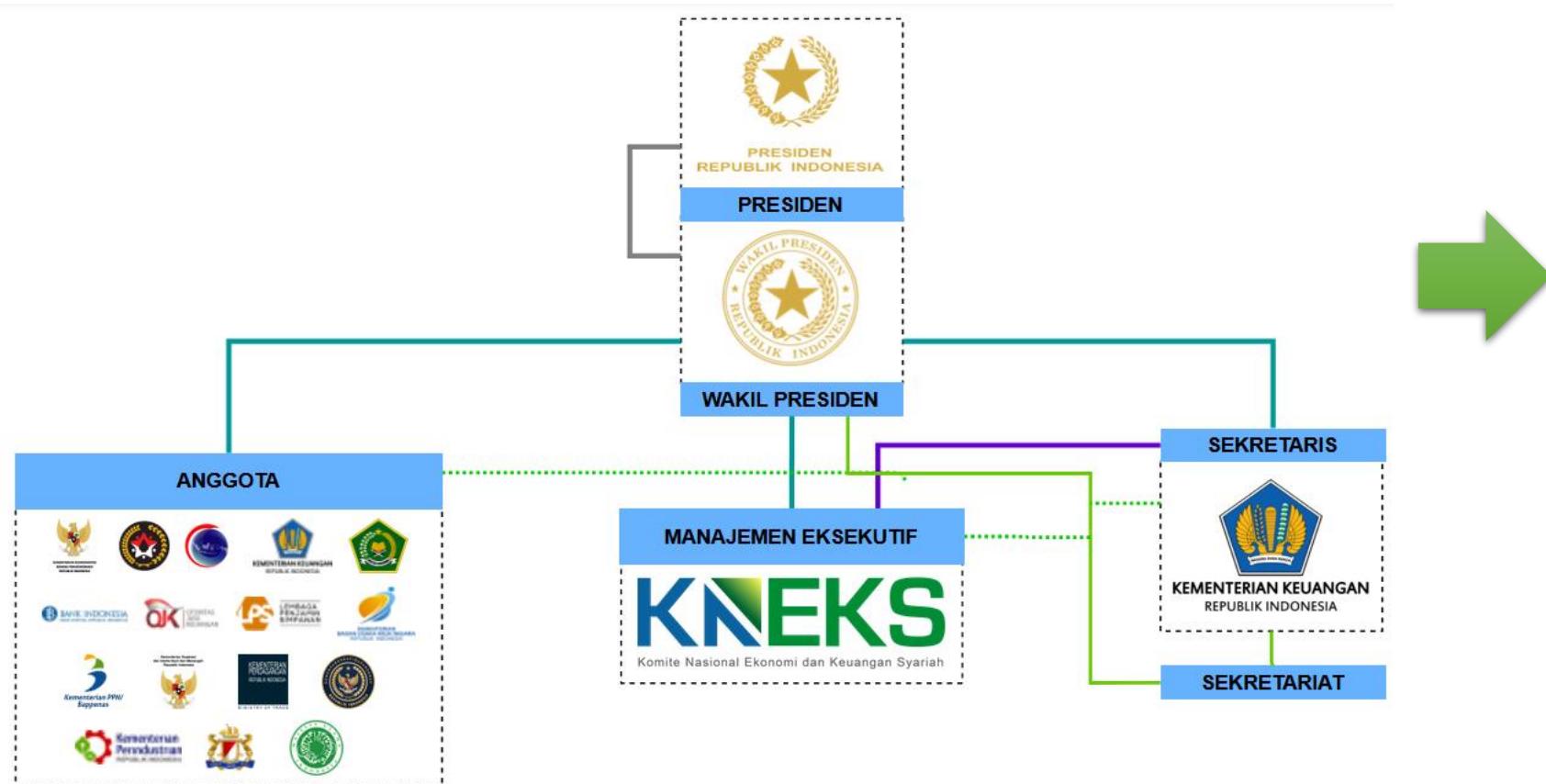
- Membangun ekosistem di sektor yang saling melengkapi merupakan target pertumbuhan yang semakin penting.
- Sektor-sektor dalam ekosistem dapat dengan cepat dikembangkan, dimana potensi risikonya lebih rendah dibandingkan fokus pada satu sektor secara terpisah.
- Menurut McKinsey, 10 hingga 15% perusahaan *incumbent* berhasil menghasilkan pendapatan non-inti dari ekosistem yang mereka ciptakan.
- Ekonomi yang terintegrasi (*network economy*) berpotensi menciptakan *values* sampai USD\$100 triliun pada tahun 2030.
- Pembangunan ekosistem menawarkan manfaat nyata dalam jangka pendek dan jangka panjang, apalagi preferensi konsumen atas ekosistem yang sangat tinggi.



Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Di tingkat pusat, terdapat KNEKS yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga dengan Wapres RI sebagai Ketua Harian

Di tingkat daerah, terdapat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dan stakeholder ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah.



22 KDEKS telah
terbentuk di 22 Provinsi
di Indonesia

Kementerian PPN/
Bappenas

Komite Nasional Keuangan Syariah

Pembentukan

KNKS
Komite Nasional Keuangan Syariah
adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dengan melibatkan para pemangku kepentingan



KNKS dibentuk melalui **Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2016** tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan memiliki kelengkapan Dewan Pengarah (beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait) dan Manajemen Eksekutif



www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/
Bappenas

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

Dalam rangka kebijakan afirmasi untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah, Pemerintah telah meluncurkan **Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI)** di sela-sela acara World Islamic Economic Forum 2016.

Masterplan AKSI

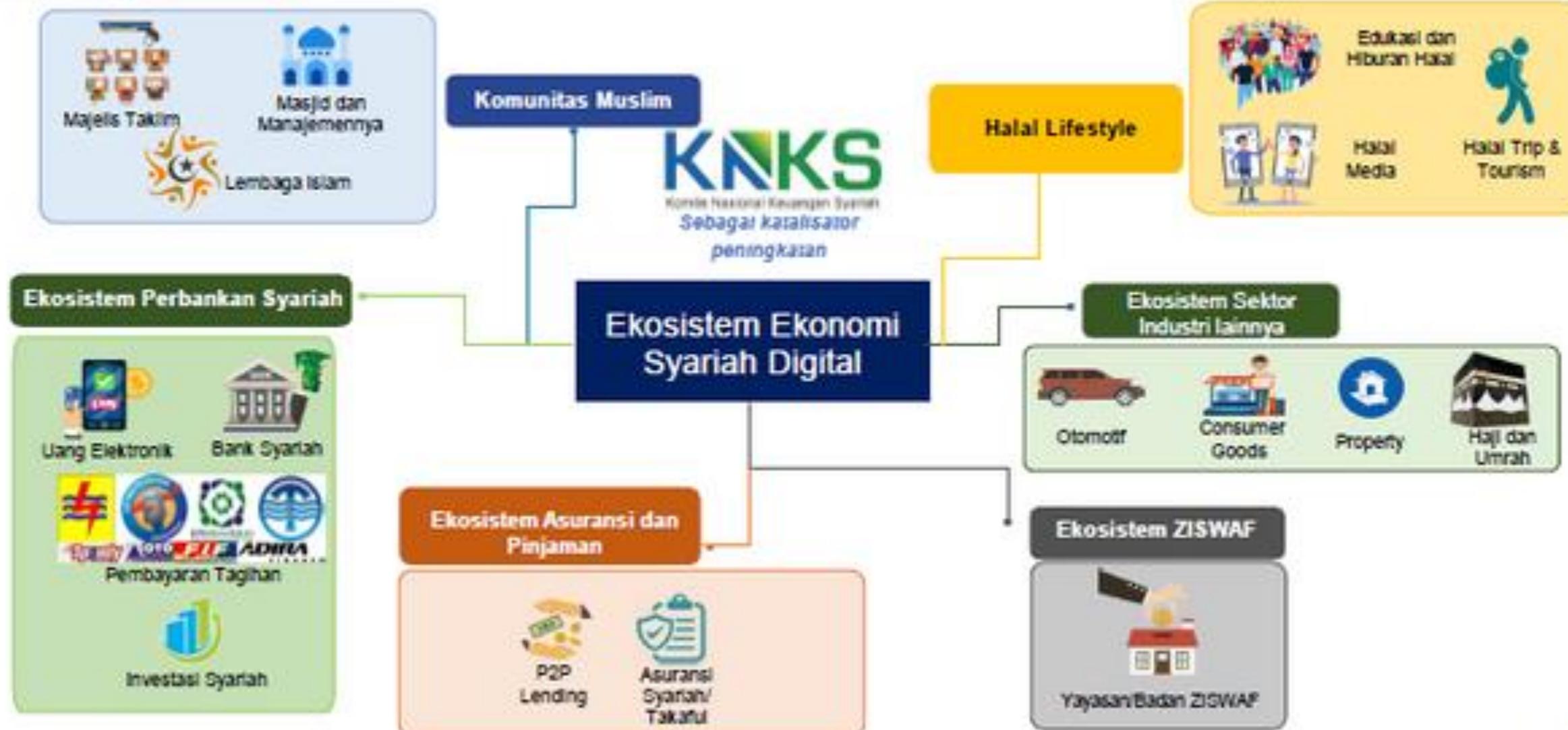
Berisi kajian dan rekomendasi untuk mengembangkan keuangan syariah di berbagai bidang, yaitu:

- Perbankan**
- Pasar modal**
- Lembaga keuangan non-bank**
- Dana sosial keagamaan**



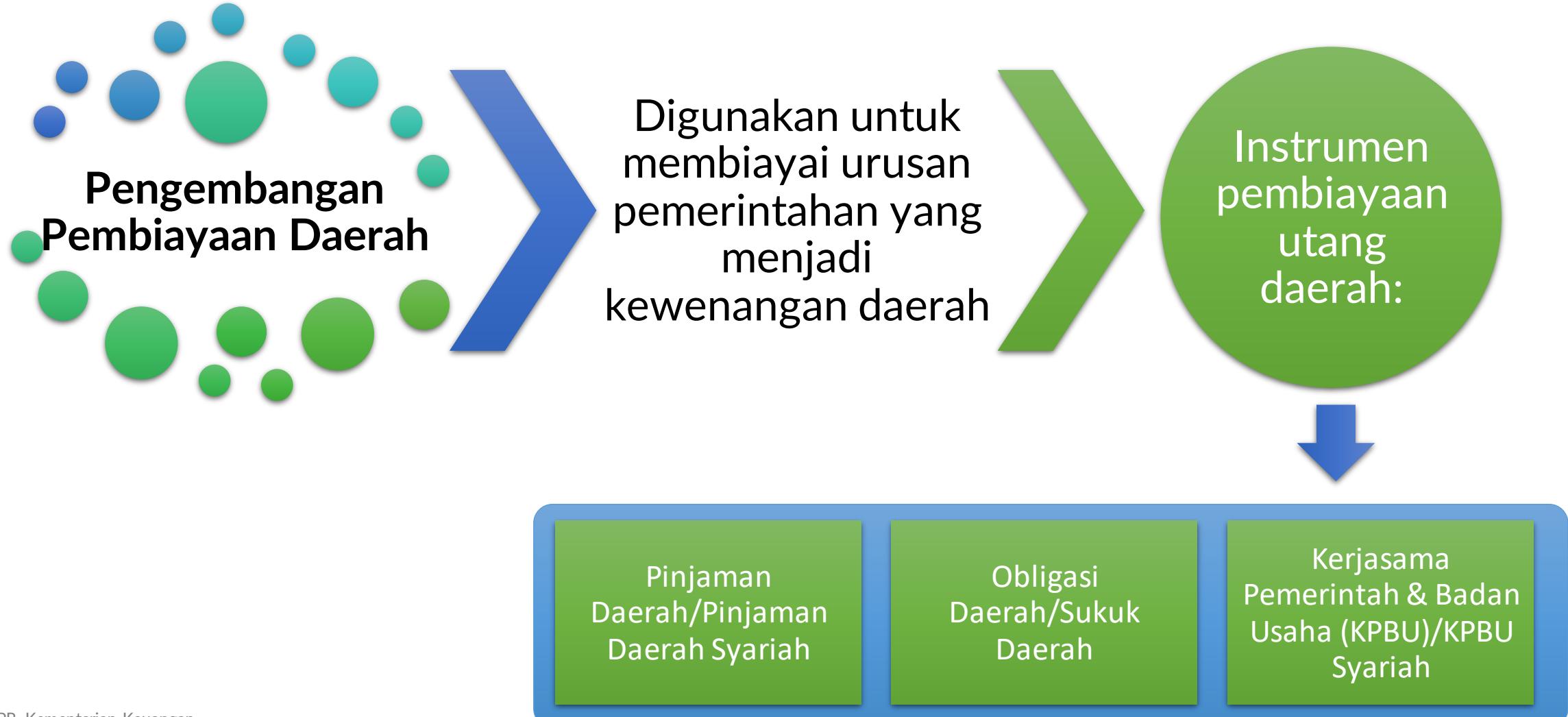
www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas

Langkah Kolaborasi KNKS dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Digital



Peluang Pengembangan Daerah Melalui Keuangan Syariah

Melalui UU No 1 Th 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), terbuka peluang pendanaan pembangunan daerah melalui instrument keuangan syariah dan skema syariah.



Peluang Pengembangan Daerah Melalui Keuangan Syariah



Perluasan
Skema Syariah

Salah satu kebijakan baru instrument Pembiayaan Utang Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yaitu **Perluasan Skema Pembiayaan Berbasis Syariah**, berupa :

- 1) Pinjaman Daerah (berbentuk Konvensional atau Syariah) → Pasal 155 ayat (5) UU HKPD
 - 2) Obligasi Daerah
 - 3) Sukuk Daerah (Syariah) ---> Pasal 154 dan Pasal 157 UU Nomor 1/2022 UU HKPD
- ✓ Pinjaman Daerah (Konvensional maupun Syariah) dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga keuangan bank dan/atau Lembaga keuangan bukan bank.
 - ✓ Pinjaman Daerah (Konvesional maupun Syariah) dilakukan dalam rangka : Pengelolaan Kas, Pembiayaan Pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD



Pinjaman
Daerah Syariah

- ✓ Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka : pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah, penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Sukuk Daerah

- ✓ **Sukuk Daerah** diterbitkan melalui **pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah**.
- ✓ **Penerbitan Sukuk Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah** dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri (Menteri Bappenas)

- ✓ Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan **kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip Syariah dari ahli Syariah pasar modal**.



Sukuk Daerah

Pertimbangan Penerbitan Sukuk Daerah

Alternatif Sumber Pendanaan Daerah

- ❖ Sukuk Daerah merupakan alternatif sumber Pendanaan Daerah yang dapat berasal dari masyarakat, selain dari pemerintah pusat; Pemerintah Daerah Lain; Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.



Adanya Insentif Ojk Dan Bei



- ❖ PUB Sukuk Daerah (penawaran bertahap selama 3 tahun).
- ❖ Pungutan OJK 0,5% dari total issuance atau max Rp150 juta.

- ❖ Sukuk yang diterbitkan Pemerintah Daerah dikenakan tarif biaya pencatatan tetap.
- ❖ Tarif biaya pencatatan 50% dari tarif normal bagi Sukuk Daerah (Rp50 juta, dari Rp100 juta).

Mendorong Transparansi & Penguatan Keuangan Daerah

- ❖ Laporan keuangan tahun terakhir WDP/WTP.
- ❖ Jumlah kumulatif pinjaman tidak lebih dari 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
- ❖ DSCR (*debt-service coverage ratio*) $\geq 2,5$

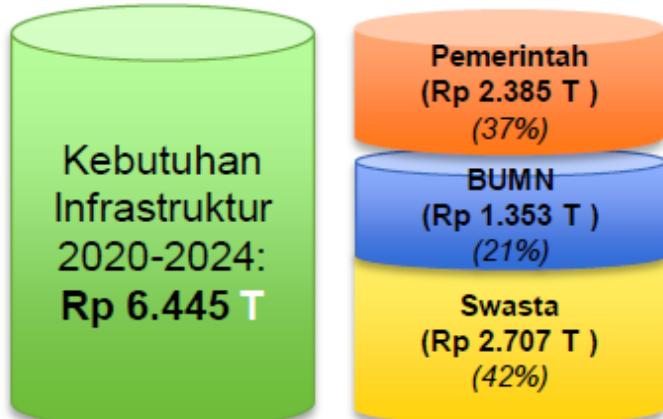
Memperluas Sumber Pendanaan & Basis Investor

- ❖ Potensi pendanaan di Pasar Modal yang berkelanjutan & persaingan penerbitan Sukuk relatif rendah.
- ❖ Meraih investor basis konvensional dan menjangkau pemodal/pengelola dana syariah.

KPBU/KPBU Syariah Sebagai Solusi Penyediaan Infrastruktur Daerah

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Mendukung Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur

KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024



Skema KPBU menjadi salah satu solusi peningkatan pemberian infrastruktur

TUJUAN UTAMA

- ❑ Mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi
- ❑ Menghindari *Middle Income Trap (MIT)* melalui pembangunan Infrastruktur
- ❑ Mencapai target *Nationally Determined Contribution (NDC)* pada tahun 2030

MISI

- ❑ Menarik lebih banyak investasi swasta termasuk dari mitra internasional
- ❑ Menerapkan prinsip *Quality Infrastructure Investment (QII)*
- ❑ Mengatasi isu terkait *sustainability* dan *resilience* untuk penyediaan layanan yang lebih baik

STRATEGI UTAMA



Investasi

Menarik investasi dari sektor swasta dengan mengimplementasikan prinsip ESG



Pembentukan

Menyediakan instrument pembentukan (termasuk pembentukan syariah) yang inovatif dan kreatif melalui; *Blended Finance* dan KPBU



Dukungan Pemerintah

Menyediakan berbagai macam dukungan pemerintah dan insentif dalam bentuk *Viability Gap Fund*, Penjaminan Pemerintah, Pembebasan Lahan, dan lainnya.



Akses Pembentukan

Meningkatkan akses pembentukan dengan lebih melibatkan sumber pembentukan dengan skala global

KPBU/KPBU Syariah Sebagai Solusi Penyediaan Infrastruktur Daerah

Perbandingan Beberapa Skema Pembiayaan Infrastruktur

	APBN	APBD	Penugasan BUMN	KPBU/KPBU Syariah	Swasta
Sumber Dana	Pemerintah Pusat (Pendapatan dan Pinjaman)	Pemerintah Daerah (Pendapatan, Pinjaman, dan Dukungan Pemerintah Daerah)	BUMN (Dana Internal BUMN, Pinjaman dan PMN)	100% Badan Usaha atau Badan Usaha dengan Pemerintah	Swasta
Penanggung Risiko	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN	Pemerintah dan Swasta	Swasta
Orientasi Pengusahaan	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum dan Finansial	Finansial
Dukungan Pemerintah	Pemerintah Pusat	Penerusan Pinjaman dari Pemerintah Pusat (DAU/DAK)	Penyertaan Modal Negara (PMN)	Dukungan Kelayakan (VGF), Penjaminan Pemerintah, Perizinan dan Pendampingan Transaksi	Perizinan
Pengembalian Investasi	-	-	Tarif	Tarif atau Availability Payment	Tarif
Kesesuaian Prinsip Syariah	Pembiayaan berbasis Syariah	-	-	Eseni kerjasama kompatibel dengan prinsip Syariah	-

TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA



Market share industri jasa keuangan syariah masih relatif kecil, yaitu sebesar 9,90% dari aset industri keuangan nasional. Perbankan syariah dituntut mampu menyediakan kebutuhan keuangan dalam pengembangan industri halal dan pengembangan lembaga keuangan syariah.

Permodalan yang terbatas. Masih terdapat 6 (enam) bank syariah yang memiliki modal inti di bawah Rp2 triliun dari total 14 bank umum syariah per Desember 2020.

Literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan syariah yang sebesar 9,1% juga masih tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 76,19%.



Terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah, antara lain kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan syariah.

Competitiveness produk dan layanan keuangan syariah yang belum setara dibandingkan keuangan konvensional. Diversifikasi produk keuangan syariah dan *business matching* menjadi hal yang sangat krusial.

Rendahnya **research and development** dalam mengembangkan produk dan layanan syariah lebih inovatif.



POTENSI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain:



Indonesia memiliki populasi muslim **87%** atau setara **230 juta** penduduk muslim.



Penduduk Indonesia terdiri dari **56,7%** penduduk perkotaan dan **43,3%** tinggal di pedesaan.



Pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi syariah tercatat sebesar **5,72%** dan PDB nasional **5,02%**.



Semakin meningkatnya industri halal Indonesia. Pada tahun 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia telah mencapai **3 miliar** dolar AS dengan tren yang meningkat.

3

ARAH KEBIJAKAN OJK DALAM MENDUKUNG EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Untuk mengembangkan keuangan syariah nasional, OJK telah memiliki arah kebijakan ke depan yang tercantum dalam **Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021-2025** yang berfokus pada 3 (tiga) aspek kunci.



Penguatan Lembaga Keuangan Syariah

OJK akan mendorong penguatan kelembagaan jasa keuangan syariah dengan mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk serta penguatan permodalan, SDM, dan TI yang mutakhir.



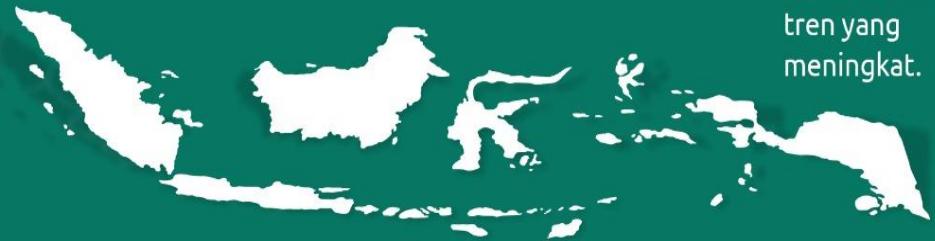
Penciptaan Demand Keuangan Syariah yang Berkelanjutan

Antara lain dengan peningkatan literasi serta inklusi keuangan syariah guna memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah.



Terbentuknya Ekosistem Keuangan Syariah yang Terintegrasi dengan Industri Halal

Antara lain melalui sinergitas antar lembaga keuangan syariah serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah hulu ke hilir.



Strategi "MES TOP" dalam Mewujudkan Ekosistem Global Halal Hub di Indonesia

Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pakar MES, Perry Warjiyo mengungkap sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan ekosistem halal hub di Indonesia. Perry merangkumnya menjadi enam poin penting dengan istilah **MES TOP** (*Marketing, Ecosystem, Synergy, Targeted, Official dan Promotion*).



Marketing

Marketing sebagai salah satu bagian dari strategi yang diperlukan untuk menembus pasar global, serta memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen di berbagai tujuan negara ekspor Indonesia.



Ecosystem

Ekosistem end-to-end yang melibatkan seluruh pihak dalam menyiapkan produk unggulan, mulai dari UMKM, pesantren, serta berbagai industri yang ada di Indonesia.



Sinergy

Membangun sinergitas bersama dengan berbagai pihak. Koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mendukung langkah selanjutnya.



Targeted

Menetapkan target terkait produk-produk unggulan yang ingin dikembangkan. Beberapa yang disebut telah menempati posisi atas adalah produk fesyen dan makanan.



Official

Dukungan dari official atau pihak yang berwenang menjadi langkah berikutnya yang memiliki peran penting dalam mendukung strategi mengembangkan global halal hub.



Promotion

Aktivitas promosi yang dilakukan pada produk halal dalam negeri, tidak hanya dilakukan di pasar domestik, tapi juga harus dilakukan hingga ke pasar global.

Empat Strategi Mendorong Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia

Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Erick Thohir meyakini, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan industri halal.



Agresif

Seluruh pemangku kepentingan harus agresif menyampaikan ke dunia luar bahwa Indonesia punya pasar industri halal yang besar



Peningkatan

Pembangunan industri halal harus terus ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan



Penguatan GCG

Penguatan good corporate governance menjadi aspek yang penting untuk diimplementasikan dalam setiap aktivitas pengelolaan industri halal nasional



Profesional

Seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan industri halal nasional memiliki profesionalisme dan standar tinggi.

● Dikutip dari pernyataan beliau ketika menerima penghargaan Tokoh Syariah Terbaik 2022 dalam agenda Investor Best Syariah Awards 2022 oleh Majalah Investor

The background image shows a panoramic view of a city skyline during sunset or sunrise. The sky is filled with soft, pastel-colored clouds in shades of pink, orange, and blue. In the foreground, there's a mix of lower residential buildings and a prominent elevated highway or bridge structure. The midground and background are dominated by a dense cluster of modern skyscrapers, with one particularly tall building on the right side featuring a distinctive curved glass facade.

**Sekian
dan
Terimakasih**